Penggunaan Istilah Proletar

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

IBM-ASMI

RudyCT Academic Series

Abstract

This article examines the meaning and use of the term roletary from its Roman origins to contemporary social analysis. It explains how Marx and Engels transformed an old census category into a relational concept describing people who depend primarily on selling their labour power because they lack effective control over the means of production. The article distinguishes proletarians from workers in general, the poor, the peasantry, the precariat, and the lumpenproletariat; reviews the term's political and scholarly uses; and discusses its Indonesian reception, particularly the adaptation of class language through the concept of Marhaen. It then considers how employment in services, informal work, platform labour, and algorithmic management complicate older images of the factory proletariat. The central argument is that roletary remains analytically useful when it identifies a structural relation to production and ownership, but becomes imprecise when used as a synonym for poverty, low status, or political identity. Responsible use therefore requires historical context, explicit criteria, empirical evidence, and attention to internal differences in gender, ethnicity, citizenship, skill, and employment security.

Keywords: proletariat; working class; wage labour; class relations; Marx; Indonesia; Marhaen; platform work

Pendahuluan

Istilah *proletar* kerap hadir dalam percakapan politik, sejarah, sastra, dan ilmu sosial. Dalam satu konteks ia menunjuk kaum pekerja yang hidup dari upah; dalam konteks lain ia dipakai sebagai nama bagi rakyat kecil, kelompok miskin kota, atau bahkan pendukung gerakan politik tertentu. Keluwesan pemakaian tersebut membuat istilah ini terasa akrab, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan: apakah setiap orang miskin adalah proletar? Apakah setiap pekerja upahan termasuk proletariat? Apakah pedagang kecil, petani penggarap, pekerja lepas, dan pengemudi aplikasi memiliki kedudukan kelas yang sama? Jawabannya bergantung pada kerangka teori, kondisi ekonomi, dan tujuan analisis.

Tulisan ini menelaah penggunaan istilah *proletar* sebagai konsep yang memiliki sejarah panjang dan makna yang berubah. Titik tolaknya ialah perbedaan antara asal kata, makna historis, dan pengertian analitis. Asal kata memberi petunjuk tentang sejarah bahasa, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan makna modern. Penggunaan dalam teori Marxian juga tidak dapat dipindahkan begitu saja ke setiap masyarakat tanpa penyesuaian. Istilah tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari analisis relasi sosial: bagaimana manusia memperoleh nafkah, siapa menguasai aset produktif, siapa mengendalikan proses kerja, serta bagaimana hasil produksi dan risiko dibagikan.

Pembahasan ini ditujukan kepada pembaca yang ingin menggunakan istilah tersebut secara cermat, bukan untuk membenarkan atau menolak suatu ideologi. Konsep kelas dapat dipakai sebagai perangkat ilmiah sekaligus mengandung muatan normatif karena menyoroti ketimpangan, ketergantungan, dan kuasa. Karena itu, naskah ini memisahkan pengertian deskriptif dari penilaian politik, serta menunjukkan kapan istilah *proletar* membantu analisis dan kapan istilah lain lebih tepat. Contoh yang dipakai

meliputi pekerja pabrik, buruh perkebunan, pegawai jasa, pekerja informal, petani dengan lahan sangat kecil, dan pekerja platform digital.

Secara ringkas, tesis artikel ini adalah bahwa *proletar* bukan sekadar kata lain untuk orang miskin atau buruh kasar. Dalam pengertian Marxian, kata tersebut menunjuk posisi relasional dalam sistem produksi, terutama ketergantungan pada penjualan tenaga kerja dan keterbatasan kontrol atas sarana produksi. Namun, posisi itu tidak otomatis menghasilkan kesadaran bersama, solidaritas, atau tindakan politik yang seragam. Keadaan pekerja dipengaruhi pula oleh sejarah, institusi, identitas sosial, kebijakan negara, organisasi, dan teknologi. Memahami istilah ini dengan baik berarti mempertahankan daya analitisnya sekaligus menghindari penyederhanaan.

1. Asal-usul kata dan perubahan makna

Kata *proletar* berakar pada bahasa Latin *proletarius*, bentuk yang berhubungan dengan *proles*, yakni keturunan atau anak. Dalam tradisi Romawi, *proletarii* merupakan kategori warga dengan kekayaan sangat rendah dalam pengelompokan sensus dan kewajiban militer. Mereka dipandang terutama memberi kontribusi kepada negara melalui keturunan, bukan melalui kemampuan menyediakan perlengkapan perang atau pajak dalam jumlah besar. Istilah tersebut bukan nama bagi kelas pekerja industri, sebab masyarakat industri modern belum terbentuk. Menghubungkan langsung *proletarii* Romawi dengan buruh pabrik abad ke-19 akan mengaburkan perubahan besar dalam struktur ekonomi dan politik.

Kategori Romawi juga memiliki rincian historis yang diperdebatkan. Sumber-sumber kuno tidak selalu memberikan gambaran yang seragam mengenai ambang kekayaan, hubungan antara *proletarii* dan *capite censi*, atau fungsi sensus dalam berbagai periode. Karena itu, penjelasan etimologis sebaiknya tidak menyederhanakan mereka sebagai kelompok tanpa harta sama sekali. Pokok yang cukup aman ialah bahwa istilah itu menandai kedudukan warga dengan aset terbatas dalam tata kewargaan Romawi. Makna awal ini memberi

jejak tentang hubungan antara status ekonomi, kewajiban publik, dan pengakuan negara, tetapi tidak sama dengan definisi kelas modern.

Dalam bahasa Eropa kemudian, kata sekeluarga dengan *proletarian* dipakai untuk menunjuk lapisan masyarakat terbawah atau orang yang sangat miskin. Perubahan paling penting terjadi ketika istilah itu masuk ke dalam wacana kritik terhadap masyarakat industri. Pertumbuhan pabrik, urbanisasi, pembentukan pasar tenaga kerja, dan pemisahan pekerja dari kepemilikan alat produksi menghasilkan suatu kelompok yang harus menjual kemampuan bekerjanya untuk memperoleh pendapatan. Di sini, yang menentukan bukan hanya rendahnya pendapatan, melainkan relasi kerja dan kepemilikan.

Karl Marx dan Friedrich Engels memberi istilah tersebut makna teoretis yang berpengaruh luas. Dalam *Manifesto of the Communist Party* (1848), proletariat dijelaskan sebagai kelas pekerja modern yang, karena tidak memiliki sarana produksi sendiri, harus menjual tenaga kerjanya untuk hidup (Marx & Engels, 1848/2002). Dengan definisi ini, pusat perhatian bergeser dari jumlah harta semata kepada hubungan sosial di dalam kapitalisme. Seorang pekerja dapat memiliki barang pribadi, tabungan kecil, atau rumah, tetapi tetap bergantung pada upah karena tidak menguasai sumber daya produktif yang memungkinkan nafkah mandiri secara berkelanjutan.

Perubahan makna itu menunjukkan bahwa istilah sosial tidak sekadar label yang menempel pada orang. Ia dapat menjadi alat untuk membaca struktur hubungan. Seseorang disebut proletar bukan karena ia memiliki ciri pribadi tertentu, melainkan karena posisi ekonominya terbentuk dalam relasi dengan pemilik modal, pengelola organisasi, pasar, dan institusi negara. Dengan demikian, kata tersebut mengandung pertanyaan tentang siapa mengendalikan produksi, bagaimana tenaga kerja dikontrak, dan siapa memperoleh manfaat dari hasil kerja.

2. Makna proletar dalam pemikiran Marx dan Engels

Dalam kerangka Marxian, kelas tidak terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan yang berdiri sendiri. Kelas berhubungan dengan posisi seseorang dalam proses produksi dan dengan relasi terhadap sarana produksi. Pemilik perusahaan menguasai aset dan keputusan investasi; pekerja mengandalkan penjualan tenaga kerja. Hubungan ini membentuk kepentingan yang dapat berbeda, misalnya mengenai upah, jam kerja, intensitas produksi, keamanan kerja, pembagian surplus, dan kendali atas tempat kerja. Kategori tersebut bersifat relasional: pengertian proletariat menjadi jelas ketika dibaca bersama kelas yang menguasai kapital dan organisasi produksi.

Dalam analisis Marx, tenaga kerja manusia memiliki kapasitas menghasilkan nilai, sedangkan pekerja menerima upah berdasarkan kondisi pasar, kekuatan tawar, institusi, dan kebutuhan reproduksi hidup. Perbedaan antara nilai yang diciptakan dan bagian yang diterima pekerja menjadi bagian dari teori nilai lebih. Gagasan ini sering dipadatkan menjadi slogan, tetapi dalam pembacaan yang serius ia merupakan kerangka untuk menjelaskan bagaimana surplus, keuntungan, dan akumulasi terbentuk melalui pengorganisasian kerja. Istilah proletar karena itu membawa perhatian kepada struktur produksi, bukan sekadar sikap moral terhadap orang kaya atau miskin.

Marx juga membedakan antara kelas sebagai posisi objektif dan kelas sebagai kekuatan sosial yang terbentuk melalui pengalaman, organisasi, serta kesadaran bersama. Orang-orang dapat berada dalam kondisi kerja yang mirip tanpa merasa mempunyai kepentingan bersama. Pekerja dapat terpecah oleh sektor, keterampilan, wilayah, jenis kelamin, etnisitas, status kewargaan, atau persaingan memperoleh pekerjaan. Kelas yang secara struktural serupa belum tentu menjadi aktor kolektif. Serikat pekerja, pers, pendidikan, organisasi politik, pengalaman pemogokan, dan kebijakan negara dapat memengaruhi proses pembentukan solidaritas (Przeworski, 1977; Wright, 1980).

Engels dan Marx menempatkan pertumbuhan industri sebagai proses yang membentuk proletariat modern. Mesin, pembagian kerja, konsentrasi produksi,

dan ekspansi pasar mengubah keterampilan serta hubungan sosial. Pekerja tidak lagi menguasai keseluruhan proses pembuatan barang sebagaimana pengrajin mandiri, melainkan melakukan bagian tertentu di bawah organisasi pabrik. Namun, hal itu bukan berarti proletariat selalu identik dengan pekerja pabrik. Pengertian luas mencakup pekerja di berbagai sektor apabila nafkah mereka bertumpu pada penjualan tenaga kerja dan keputusan produksi berada di luar kendali mereka.

Salah satu penyederhanaan umum ialah menyamakan proletar dengan orang yang tidak mempunyai apa pun. Dalam praktik, kelas pekerja dapat memiliki barang konsumsi, kendaraan, rumah dengan cicilan, atau tabungan. Yang lebih relevan ialah apakah aset tersebut memberi kontrol efektif atas proses produksi dan memungkinkan seseorang memperoleh penghidupan tanpa menjual tenaga kerjanya. Seorang operator mesin dengan rumah sederhana tetap dapat bergantung pada upah. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan rendah dari usaha kecil milik sendiri mungkin tidak berada dalam posisi proletar yang sama, walaupun kehidupannya rapuh dan rentan.

3. Proletar, buruh, pekerja, kemiskinan, dan kelas menengah

Dalam percakapan sehari-hari, *proletar*, *buruh*, dan *pekerja* sering dipertukarkan. Secara analitis, ketiganya memiliki cakupan berbeda. *Pekerja* adalah istilah luas bagi orang yang melakukan kerja, termasuk pekerja mandiri dan pemilik usaha yang turut bekerja. *Buruh* dalam bahasa Indonesia sering dipakai bagi pekerja yang menerima upah, khususnya pada sektor manual atau industrial, walaupun penggunaan kontemporer juga mencakup buruh jasa dan sektor informal. *Proletar* lebih khusus sebagai kategori teori sosial yang menekankan ketergantungan pada penjualan tenaga kerja serta hubungan terhadap kepemilikan dan kendali produksi.

Perbedaan tersebut membantu mencegah kekeliruan kategori. Semua buruh upahan mungkin memiliki ciri proletarian, tetapi kondisi konkretnya berbeda. Seorang buruh harian konstruksi yang tidak memiliki kontrak dan menghadapi

pendapatan tak menentu memiliki kerentanan berbeda dari pegawai tetap dengan serikat kuat. Seorang profesional bergaji tinggi mungkin tidak memiliki perusahaan, tetapi memiliki otonomi kerja, keahlian yang langka, kewenangan mengawasi orang lain, dan aset finansial. Ia dapat memiliki beberapa ciri pekerja upahan sekaligus posisi yang lebih menguntungkan dalam organisasi. Kajian kelas kontemporer kerap menggunakan konsep lokasi kelas yang berlapis untuk menangkap ambiguitas ini (Wright, 2000).

Proletariat juga tidak sama dengan kelompok miskin. Kemiskinan merujuk pada kekurangan sumber daya atau ketidakmampuan memenuhi standar kebutuhan hidup tertentu. Proletarianisasi adalah proses ketika orang kehilangan atau tidak memiliki sarana hidup mandiri dan menjadi makin bergantung pada upah atau pasar tenaga kerja. Seorang petani kecil dapat miskin tetapi tidak sepenuhnya proletar jika ia masih menguasai lahan dan sebagian produksi sendiri. Sebaliknya, pekerja berupah dengan pendapatan di atas garis kemiskinan dapat berada dalam relasi proletarian karena nafkahnya tergantung pada pekerjaan yang dikendalikan pihak lain.

Istilah kelas menengah pun tidak memiliki satu batas universal. Pendidikan, status pekerjaan, pendapatan, kepemilikan aset, kewenangan, dan gaya hidup dapat menghasilkan klasifikasi berbeda. Manajer menengah yang menerima gaji tetapi memiliki kuasa mengawasi dan menentukan kerja bawahan menempati posisi yang tidak identik dengan buruh produksi. Pemilik usaha mikro yang bekerja sendiri dapat lebih dekat pada produsen kecil daripada kapitalis besar, tetapi jika usahanya mempekerjakan orang dan mengambil keputusan produksi, terdapat hubungan kelas yang lebih kompleks. Karena itu, label proletar tidak seharusnya ditetapkan hanya berdasarkan pakaian, selera, pendidikan, atau tempat tinggal.

Perbedaan lain adalah *lumpenproletariat*, istilah yang digunakan Marx dan Engels secara historis untuk menyebut lapisan yang berada di luar atau sangat longgar terhubung dengan kerja produksi yang terorganisasi, sering kali dalam posisi marginal. Penggunaan istilah ini memiliki muatan penilaian politik dan

tidak selalu konsisten sepanjang karya-karya Marx. Dalam penggunaan sekarang, istilah itu berisiko merendahkan kelompok miskin, penganggur, tunawisma, pekerja jalanan, atau mereka yang mencari nafkah di ekonomi informal. Kemiskinan dan ketidakstabilan hidup tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa seseorang tidak memiliki solidaritas atau kapasitas politik. Untuk penelitian kontemporer, istilah yang lebih deskriptif—misalnya pekerja informal, penganggur, pekerja rentan, atau rumah tangga miskin—sering lebih tepat.

4. Proletarisasi sebagai proses sosial dan ekonomi

Kata *proletarisasi* merujuk pada proses yang membuat individu atau kelompok semakin bergantung pada penjualan tenaga kerja dan kehilangan kontrol atas sumber nafkah produktif. Proses ini berlangsung dalam banyak bentuk. Pengambilalihan lahan dapat mendorong petani menjadi buruh kebun; mekanisasi dapat mengurangi kebutuhan akan keterampilan tertentu; utang dapat memaksa rumah tangga menjual tenaga kerja; privatisasi aset bersama dapat memutus akses terhadap sumber daya alam; dan perubahan rantai pasok dapat menjadikan produsen kecil bergantung pada pembeli dominan. Proletarisasi tidak selalu terjadi sekaligus dan tidak selalu menghasilkan pekerjaan formal.

Dalam masyarakat agraris, rumah tangga sering menggabungkan beberapa sumber pendapatan. Keluarga petani dapat mengolah lahan kecil, mengambil pekerjaan musiman, menjadi buruh tani di lahan tetangga, berdagang, dan mengirim anggota keluarga ke kota. Keadaan demikian lebih tepat dipahami sebagai semi-proletarianisasi atau livelihood campuran daripada dipaksa ke dalam kategori pekerja industri penuh. Penghasilan upahan bisa menjadi bagian penting tanpa sepenuhnya menggantikan kerja mandiri. Analisis yang mengabaikan strategi rumah tangga akan sulit menjelaskan mobilitas kerja, migrasi, dan kerentanan musiman.

Proletarisasi juga tidak identik dengan kemunduran mutlak. Orang yang sebelumnya bekerja tanpa upah dalam usaha keluarga dapat memperoleh pekerjaan formal, pendapatan tunai, jaminan sosial, dan kemampuan berorganisasi. Pada saat yang sama, ia mungkin kehilangan kendali atas waktu, alat, dan tujuan kerja. Karena itu, proses tersebut dapat menghasilkan peluang dan ketergantungan sekaligus. Dampaknya perlu diukur melalui upah riil, stabilitas, kesehatan, keselamatan, kemampuan menolak kondisi buruk, akses jaminan sosial, serta pengaruh pekerja atas keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Hubungan antara proletarisasi dan pembangunan perlu dibaca secara historis. Industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan migrasi dapat menciptakan pekerjaan serta produktivitas, tetapi perubahan kepemilikan dan tata kerja juga dapat memindahkan risiko kepada pekerja. Perusahaan dapat mengakses tenaga kerja yang lebih luas, sementara pekerja menghadapi kontrak singkat dan persaingan yang makin besar. Di perkebunan kolonial Indonesia, misalnya, pembentukan tenaga kerja kontrak dan mobilisasi buruh terkait dengan kebijakan tanah, investasi, dan rezim kolonial. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa hubungan kelas tidak terbentuk hanya oleh pilihan individu, tetapi juga oleh hukum dan kekuasaan politik.

5. Pemakaian istilah dalam politik dan gerakan sosial

Istilah *proletar* sejak abad ke-19 menjadi bagian dari bahasa gerakan buruh dan politik sosialis. Ia dapat digunakan sebagai deskripsi kelompok, seruan solidaritas, identitas kolektif, atau dasar legitimasi politik. Ungkapan "proletariat internasional" menekankan kepentingan bersama lintas bangsa, khususnya ketika pekerja di berbagai negara dianggap mengalami tekanan serupa dari kapitalisme. Akan tetapi, identitas internasional tersebut selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa pekerja memiliki bahasa, agama, kewargaan, sejarah kolonial, dan kepentingan nasional yang berbeda.

Dalam tradisi Marxis, proletariat kerap disebut sebagai subjek perubahan karena pekerja secara kolektif terlibat dalam produksi dan memiliki potensi untuk mengubah hubungan produksi. Pernyataan ini bersifat teoretis dan politis, bukan fakta otomatis. Tidak setiap pekerja menginginkan perubahan revolusioner, dan tidak setiap gerakan yang mengatasnamakan pekerja mewakili seluruh pekerja. Organisasi dapat memperluas daya tawar, tetapi dapat pula dikuasai elite, bersaing satu sama lain, atau mengecualikan kelompok pekerja tertentu. Karena itu, analisis akademik perlu membedakan antara kelas sebagai kategori ekonomi, kelas sebagai identitas, dan kelas sebagai aktor politik.

Dalam rezim-rezim yang mengklaim berbicara atas nama proletariat, istilah itu dapat memperoleh makna resmi dan menjadi dasar narasi legitimasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak mendefinisikan kepentingan pekerja, bagaimana perbedaan pendapat ditangani, dan apakah perlindungan kerja benar-benar meningkat. Bahasa proletar dapat mendorong solidaritas dan pembelaan hak; ia juga dapat dipakai sebagai slogan yang menutupi ketimpangan kekuasaan internal. Penilaian terhadap suatu kebijakan harus bertumpu pada institusi, hasil, kebebasan berserikat, distribusi manfaat, dan kondisi hidup, bukan pada label ideologisnya saja.

Dalam demokrasi kontemporer, istilah tersebut dapat digunakan secara kritis untuk mengangkat pengalaman pekerja yang kurang terlihat, termasuk pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja logistik, pekerja perawatan, dan pekerja digital. Namun, penggunaan yang terlalu luas dapat menghilangkan kekhususan. Misalnya, menyebut seluruh rakyat sebagai proletar dapat memberi kesan persatuan, tetapi juga menutupi perbedaan kepemilikan, kepentingan, dan posisi tawar. Bahasa politik yang kuat perlu disertai analisis siapa yang dimaksud, kondisi apa yang mereka alami, dan kebijakan apa yang diusulkan.

6. Penerimaan dan penyesuaian istilah di Indonesia

Istilah *proletar* masuk ke dalam wacana politik Indonesia melalui penerjemahan dan peredaran pemikiran sosialisme serta Marxisme, terutama pada masa kolonial dan awal gerakan nasional. Namun, penerapannya menghadapi konteks yang berbeda dari Eropa industri. Struktur ekonomi Indonesia saat itu ditandai oleh kolonialisme, perkebunan, kerja paksa dan kontrak, ekonomi desa, kepemilikan tanah yang beragam, serta lapisan pengusaha kecil. Kelompok tertindas tidak seluruhnya berupa buruh pabrik tanpa alat produksi. Petani, nelayan, pedagang kecil, buruh perkebunan, dan kaum miskin kota berada dalam relasi yang berbeda terhadap tanah, pasar, dan negara.

Perdebatan ini tampak dalam usaha menerjemahkan kategori kelas ke dalam kosakata politik yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Sukarno mengembangkan konsep *Marhaen* untuk merujuk kepada rakyat kecil yang tertindas, termasuk petani yang masih mempunyai alat produksi sederhana, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja. Sejumlah kajian sejarah menunjukkan bahwa istilah tersebut merupakan bentuk rekontekstualisasi (Muslim et al., 2026): ia mengambil inspirasi dari analisis kelas, tetapi tidak sekadar menyalin gambaran proletariat Eropa. Marhaenisme menyoroti kemiskinan dan penguasaan ekonomi yang terbatas, sekalipun seseorang masih memiliki alat kerja atau sebidang lahan.

Penyesuaian itu penting secara konseptual. Petani yang memiliki cangkul atau lahan sempit tidak sama dengan buruh pabrik yang menjual tenaga kerja sepanjang tahun, tetapi keduanya dapat menghadapi ketergantungan pada tengkulak, kreditur, pemilik lahan besar, perusahaan, atau kebijakan pemerintah. Menyatukan mereka ke dalam satu kategori politik dapat membangun koalisi, tetapi analisis ekonomi tetap perlu membedakan sumber penghasilan dan hubungan produksi. Marhaen dapat dipahami sebagai kategori politik yang lebih luas daripada proletariat Marxian, bukan sebagai sinonim yang sepenuhnya sama.

Perkembangan buruh Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari pembentukan organisasi, nasionalisme, dan perubahan politik. Pekerja perkebunan, pelabuhan, transportasi, percetakan, dan industri menghadapi hubungan kerja yang dipengaruhi kolonialisme dan negara pascakemerdekaan. Gerakan buruh tidak hanya berjuang mengenai upah, tetapi terlibat dalam persoalan demokrasi, kedaulatan, dan pengaturan ekonomi. Setelah perubahan rezim, bentuk organisasi, ruang kebebasan, hubungan industrial, dan strategi politik pekerja pun berubah. Oleh karena itu, kata proletar dalam sejarah Indonesia perlu dibaca dengan melihat konteks masa, aktor, dan kepentingan yang memakainya.

Di Indonesia sekarang, *buruh* sering menjadi istilah sehari-hari dan politik yang lebih lazim dibanding *proletar*. Istilah proletar terdengar lebih teoritis, historis, atau ideologis. Ia dapat digunakan dalam kelas sosiologi, kajian sejarah, teori politik, dan analisis relasi kerja. Dalam komunikasi publik, penyebutan "pekerja berupah", "buruh pabrik", "pekerja informal", "petani gurem", atau "pekerja platform" biasanya lebih jelas apabila yang dimaksud adalah kelompok tertentu. Kata *proletar* tetap berguna untuk membingkai pola struktural lintas sektor, asalkan definisinya dijelaskan.

7. Proletariat dalam ekonomi jasa dan kerja kontemporer

Gambaran klasik tentang proletariat sering berpusat pada pabrik besar, mesin, seragam kerja, dan serikat industri. Struktur ekonomi kini jauh lebih beragam. Pekerjaan jasa, kesehatan, pendidikan, logistik, ritel, administrasi, dan teknologi informasi mempekerjakan banyak orang yang menerima upah tetapi tidak bekerja di pabrik. Perluasan sektor jasa tidak menghapus relasi proletarian. Seorang pramuniaga, perawat kontrak, staf pusat panggilan, atau pekerja kebersihan dapat bergantung pada upah dan bekerja dalam proses yang ditentukan organisasi. Bentuk kerja berubah, tetapi persoalan kontrol, keamanan, dan distribusi manfaat tetap relevan.

Pada saat bersamaan, pekerja kontemporer tidak selalu berada pada posisi yang sama. Seorang dokter spesialis, dosen tetap, staf administrasi, tenaga keamanan alih daya, dan kurir dapat sama-sama menerima upah, namun berbeda dalam otonomi profesional, keamanan, daya tawar, kontrol atas waktu, dan kesempatan memengaruhi keputusan. Teori kelas perlu menghindari gambaran bahwa proletariat merupakan kelompok homogen. Kategori luas dapat menunjukkan pola umum, sedangkan penelitian empiris harus mengurai variasi yang terdapat di dalamnya.

Ekonomi informal memperumit kategorisasi. Pekerja yang berjualan di jalan, memulung, menjadi pekerja rumah tangga, atau melakukan jasa perbaikan mungkin tidak memiliki kontrak kerja. Mereka bisa bergantung pada penjualan tenaga kerja, kepemilikan mikro, jaringan patronase, atau akses informal ke ruang kota. Tidak adanya hubungan kerja formal tidak berarti tidak ada relasi kuasa. Namun, menyebut setiap pekerja informal sebagai proletar tanpa memeriksa sumber nafkah dan hubungan ekonominya akan menghasilkan kategori yang terlalu longgar. Konsep seperti pekerja rentan, pekerja mandiri subsisten, semi-proletar, dan pekerja informal kadang lebih informatif.

Pertumbuhan kerja kontrak dan alih daya menciptakan pembagian di dalam tempat kerja yang sama. Pekerja tetap dan pekerja vendor dapat menjalankan tugas berdekatan tetapi menikmati hak dan keamanan berbeda. Pembagian seperti ini berpengaruh pada solidaritas dan kemampuan bernegosiasi. Perusahaan memperoleh fleksibilitas tenaga kerja, sementara pekerja mungkin menghadapi ketidakpastian jadwal, akses pelatihan terbatas, dan tanggung jawab sosial yang tidak sebanding. Studi proletariat hari ini perlu memperhatikan rantai produksi dan pembagian tanggung jawab antara pemberi kerja formal, kontraktor, pemasok, serta negara.

8. Kerja platform dan proletarisasi digital

Platform digital sering menggambarkan pekerja sebagai mitra independen yang bebas menentukan jam dan lokasi kerja. Sebagian fleksibilitas memang

nyata, tetapi harus dilihat bersama mekanisme lain: penetapan tarif, pembagian pesanan, penilaian pelanggan, sistem insentif, pemeringkatan, suspensi akun, dan pengumpulan data. Pengemudi atau kurir dapat memiliki kendaraan sendiri, namun bergantung pada akses terhadap aplikasi untuk memperoleh pelanggan. Kepemilikan alat kerja tidak otomatis berarti kontrol penuh atas pasar, harga, atau proses kerja.

Dalam konteks ini, istilah proletar dapat membantu mengajukan pertanyaan yang lebih tepat daripada sekadar menilai apakah pekerja berstatus "mitra" atau "karyawan". Seberapa besar ketergantungan pekerja pada platform? Siapa menentukan tarif dan aturan layanan? Siapa menanggung biaya kendaraan, bahan bakar, perawatan, kecelakaan, dan waktu tunggu? Apakah pekerja dapat melihat serta menggugat keputusan algoritmik? Apakah mereka memiliki alternatif pendapatan yang realistis? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu membantu menilai apakah hubungan kerja memiliki ciri proletarian, meskipun status hukumnya tidak mengikuti bentuk kerja upahan klasik.

Algoritma dapat menjadi alat koordinasi sekaligus pengawasan. Sistem dapat mengatur urutan tugas, menghitung kinerja, memprediksi permintaan, dan memberi sanksi secara otomatis atau semiotomatis. Dalam beberapa sektor, instruksi digital dapat mengurangi kebutuhan akan pengalaman dan mempersempit ruang keputusan pekerja. Penelitian tentang "proletarisasi sibernetik" menggambarkan bagaimana digitalisasi dapat mengubah keterampilan, mempercepat intensitas kerja, dan membuat proses kerja terus-menerus terukur (Schaupp, 2022). Namun, teknologi tidak memiliki satu dampak yang niscaya: hasilnya bergantung pada desain sistem, model bisnis, regulasi, dan kekuatan pekerja.

Pekerja digital jarak jauh di Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara juga menunjukkan bahwa konektivitas global tidak selalu disertai perlindungan sosial yang memadai. Pekerja lepas daring dapat menjangkau klien lintas negara, tetapi menghadapi persaingan harga, pembayaran tidak menentu, waktu kerja tak berbayar untuk mencari proyek, dan keterbatasan jaminan

kesehatan (Wood et al., 2019). Mereka mungkin memiliki komputer dan keterampilan khusus, namun kontrol atas permintaan serta harga berada pada klien atau platform. Sebagian pekerja memiliki posisi tawar tinggi, sedangkan yang lain mudah digantikan. Karena itu, "pekerja digital" bukan kelas tunggal.

Digitalisasi juga menciptakan peluang organisasi baru. Pekerja dapat berbagi informasi, mengorganisasi kampanye, membangun komunitas, atau menawarkan layanan melalui koperasi platform. Koperasi digital berpotensi memberi anggota kontrol yang lebih besar atas data, tata kelola, dan pembagian pendapatan. Potensi itu tidak otomatis terwujud: koperasi perlu modal, teknologi yang dapat diandalkan, kemampuan manajerial, aturan partisipasi, serta akses pasar. Kendati demikian, contoh tersebut menunjukkan bahwa pekerja bukan sekadar objek teknologi atau korban pasif; mereka dapat membentuk institusi yang mengubah relasi produksi.

9. Dimensi gender, migrasi, etnisitas, dan reproduksi sosial

Istilah proletar kerap menonjolkan hubungan kerja di tempat produksi, tetapi kehidupan pekerja juga ditopang oleh kerja reproduktif: mengasuh anak, merawat anggota keluarga, memasak, membersihkan rumah, dan menjaga keberlangsungan komunitas. Banyak pekerjaan tersebut dilakukan tanpa upah dan secara tidak proporsional oleh perempuan. Jika analisis hanya menghitung jam kerja berbayar, ia mengabaikan fondasi sosial yang memungkinkan tenaga kerja hadir setiap hari. Pemahaman kelas yang memadai perlu memasukkan hubungan antara produksi komoditas dan pemeliharaan kehidupan.

Pengalaman pekerja perempuan dipengaruhi oleh segmentasi pekerjaan, diskriminasi upah, tanggung jawab pengasuhan, pelecehan, serta keterbatasan akses terhadap jabatan dan organisasi. Perempuan dapat menjadi pekerja pabrik atau jasa dengan relasi proletarian, tetapi juga menjalankan usaha keluarga dan pekerjaan perawatan. Identitas gender tidak menghapus relasi kelas, tetapi membentuk cara relasi tersebut dialami. Demikian pula, etnisitas,

agama, status kewargaan, dan asal daerah dapat menentukan akses terhadap pekerjaan, perlindungan, serta perlakuan di tempat kerja.

Pekerja migran menghadapi ketergantungan tambahan pada dokumen, agen perekrutan, dan izin tinggal. Dalam beberapa kasus, mereka tidak mudah berpindah kerja atau menyampaikan keluhan karena risiko kehilangan pekerjaan dan status legal. Posisi ini memperlihatkan bahwa kelas bersinggungan dengan hukum dan kewargaan. Dua pekerja yang melakukan pekerjaan sama dapat memiliki daya tawar berbeda karena salah satunya lebih rentan terhadap deportasi atau penahanan upah. Oleh sebab itu, proletariat bukan hanya kategori ekonomi abstrak; ia berinteraksi dengan institusi politik yang mengatur mobilitas manusia.

Perbedaan-perbedaan tersebut berpengaruh pula pada pembentukan solidaritas. Serikat atau gerakan kelas yang mengabaikan pekerja perempuan, migran, pekerja rumahan, atau kelompok minoritas berisiko mempertahankan hierarki internal. Sebaliknya, solidaritas yang mengakui kebutuhan beragam dapat memperluas agenda, misalnya mencakup upah layak, perlindungan kesehatan, cuti pengasuhan, keselamatan, kebebasan berserikat, dan perlindungan dari diskriminasi. Kepentingan bersama tidak berarti pengalaman semua pekerja identik.

10. Cara menggunakan istilah secara akademik

Penulis atau pengajar yang menggunakan istilah *proletar* perlu menyatakan kerangka definisinya. Apakah istilah digunakan dalam arti historis Romawi, arti Marxian, pemakaian politik, atau penggunaan sehari-hari? Apakah unit analisisnya individu, rumah tangga, sektor pekerjaan, atau kelas sebagai kekuatan kolektif? Tanpa kejelasan tersebut, pembaca dapat mengira semua makna itu sama. Penjelasan definisi pada awal tulisan atau kuliah akan membantu menghindari perdebatan semantik yang tidak produktif.

Langkah berikutnya adalah menyebut indikator atau bukti yang mendukung klasifikasi. Dalam penelitian, indikator dapat mencakup sumber utama

pendapatan, status kepemilikan alat dan aset produktif, ketergantungan pada upah, kendali atas jadwal serta metode kerja, kewenangan mengawasi pekerja lain, stabilitas kontrak, kemampuan menentukan harga, dan akses terhadap perlindungan. Tidak semua indikator harus dipakai secara mekanis. Peneliti harus menyesuaikannya dengan pertanyaan penelitian dan konteks lokal, serta menjelaskan alasan pemilihan indikator.

Pembedaan antara fakta dan interpretasi juga penting. "Sebagian besar pendapatan responden berasal dari upah" merupakan temuan deskriptif. "Responden berada pada posisi proletarian" adalah klasifikasi teoretis yang membutuhkan kriteria. "Kelas pekerja harus melakukan tindakan politik tertentu" merupakan argumen normatif. Ketiganya dapat saling berhubungan, tetapi tidak boleh dicampur tanpa penjelasan. Praktik ini sangat penting dalam tulisan akademik, laporan kebijakan, dan komunikasi media karena istilah kelas sering membawa muatan politik.

Istilah yang tepat bergantung pada tujuan. Jika pembahasan berfokus pada kemiskinan, gunakan ukuran kemiskinan dan indikator kesejahteraan. Jika fokusnya hubungan kerja, sebut status kerja, upah, dan kondisi kontrak. Jika yang dikaji adalah kepemilikan dan kontrol produksi, istilah proletariat atau kelas pekerja dapat memberi kedalaman teoretis. Jika perhatian tertuju pada ketidakpastian kerja, gunakan konsep prekariat dengan menyatakan kerangka dan perdebatan yang menyertainya. Mengganti satu istilah dengan yang lain tanpa menjelaskan perbedaan dapat membuat analisis kabur.

Di ruang kelas, contoh perbandingan dapat membantu mahasiswa memahami batas konsep. Bandingkan pegawai pabrik tetap, pemilik warung yang bekerja sendiri, buruh tani musiman yang juga memiliki lahan kecil, manajer toko, dan pengemudi platform. Minta mahasiswa memetakan sumber penghasilan, aset produktif, kendali kerja, risiko, dan kemampuan bernegosiasi. Mereka mungkin menemukan bahwa label sosial tidak selalu sejalan dengan posisi ekonomi. Latihan demikian menunjukkan bahwa kelas bukan tebak-tebakan berdasarkan penampilan, melainkan analisis hubungan.

11. Kesalahpahaman yang perlu diluruskan

Kesalahpahaman pertama adalah bahwa proletar berarti orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Definisi Marxian menekankan ketergantungan pada penjualan tenaga kerja dan keterbatasan kontrol atas sarana produksi, bukan ketiadaan semua barang pribadi. Kesalahpahaman kedua adalah bahwa semua orang miskin termasuk proletar. Kemiskinan menggambarkan keadaan sumber daya, sedangkan proletariat menunjuk relasi sosial-ekonomi tertentu. Kedua kategori dapat bertumpang tindih, tetapi tidak identik.

Kesalahpahaman ketiga ialah bahwa proletar hanya terdiri atas pekerja laki-laki pabrik. Sejarah industrialisasi memang sering menempatkan pabrik dan pekerja laki-laki di pusat narasi, tetapi banyak pekerja perempuan, pekerja jasa, pekerja rumah tangga, pekerja migran, dan pekerja informal juga menjalani ketergantungan upahan. Kesalahpahaman keempat adalah bahwa semua orang berupah memiliki kepentingan dan kesadaran politik yang sama. Pengalaman kelas dipengaruhi oleh keterampilan, status, gender, etnisitas, keamanan kerja, organisasi, dan kondisi keluarga.

Kesalahpahaman kelima menganggap istilah itu hanya slogan komunis dan tidak dapat dipakai dalam kajian ilmiah. Sebaliknya, konsep proletariat dapat digunakan sebagai perangkat analisis historis dan sosiologis, termasuk oleh peneliti yang tidak menerima seluruh teori Marx. Syaratnya, definisi dan batas penggunaannya dijelaskan. Kesalahpahaman keenam menganggap pengakuan pekerja sebagai proletar otomatis membuktikan bahwa suatu kebijakan atau gerakan benar. Kategori analitis tidak menggantikan penilaian empiris dan normatif atas dampak kebijakan.

Kesalahpahaman lain ialah bahwa perubahan teknologi menghapus proletariat. Otomatisasi dapat menggantikan sebagian tugas, tetapi juga menciptakan pekerjaan baru, memperluas pengawasan, dan mengubah siapa yang memiliki data maupun infrastruktur. Teknologi menggeser bentuk relasi, bukan selalu menghilangkannya. Pertanyaan penting bukan hanya berapa pekerjaan yang hilang, melainkan siapa menguasai teknologi, siapa menanggung biaya transisi,

apakah pekerja dapat memperoleh keterampilan baru, dan bagaimana hasil produktivitas dibagikan.

12. Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Bagi pembuat kebijakan, perspektif proletariat mengarahkan perhatian pada daya tawar dan distribusi risiko. Perlindungan pekerja tidak cukup diukur dari jumlah pekerjaan yang tercipta. Kualitas pekerjaan mencakup pendapatan yang memadai, jam kerja yang dapat diprediksi, keselamatan, jaminan sosial, kesempatan meningkatkan keterampilan, akses terhadap pengaduan, dan kebebasan berorganisasi. Dalam ekonomi platform, aturan perlu memperjelas tanggung jawab terhadap kecelakaan, transparansi tarif, mekanisme penonaktifan akun, dan akses pekerja terhadap data kinerja yang relevan.

Bagi organisasi dan manajer, konsep tersebut dapat menjadi pengingat bahwa tenaga kerja bukan semata-mata biaya variabel. Desain kerja, teknologi pemantauan, dan kebijakan kinerja membentuk pengalaman, motivasi, kesehatan, serta kepercayaan pekerja. Efisiensi yang dicapai melalui intensifikasi tanpa konsultasi dapat menaikkan produktivitas jangka pendek sambil merusak retensi dan keselamatan. Praktik manajemen yang bertanggung jawab memberi ruang bagi suara pekerja, menjelaskan kriteria penilaian, memastikan imbalan yang wajar, dan membagi manfaat inovasi secara transparan.

Dalam pendidikan manajemen, istilah proletar dapat digunakan untuk mengajarkan analisis pemangku kepentingan dan relasi kuasa. Mahasiswa dapat menelaah rantai pasok sebuah produk: siapa menyediakan bahan, siapa mengolah, siapa mengatur logistik, siapa menanggung risiko, dan siapa memperoleh nilai terbesar. Kasus industri garmen, pengantaran makanan, perkebunan, atau layanan kesehatan dapat menunjukkan bagaimana keputusan strategis perusahaan berpengaruh pada pekerja dan rumah tangga. Analisis tersebut tidak mengharuskan mahasiswa menerima satu ideologi, tetapi mendorong pemahaman bahwa strategi organisasi memiliki konsekuensi sosial.

Kebijakan transisi digital dan hijau juga perlu mempertimbangkan pekerja yang terdampak. Otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi pekerjaan berbahaya, tetapi tanpa dialog dan pelatihan dapat menghilangkan pendapatan serta memperlebar kesenjangan. Program transisi yang baik menghubungkan investasi teknologi dengan perencanaan keterampilan, perlindungan pendapatan sementara, mobilitas kerja, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Perspektif kelas membantu mengidentifikasi siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang membayar biaya perubahan.

13. Kerangka praktis untuk membaca kasus

Untuk memakai istilah *proletar* secara operasional, pembaca dapat mengajukan lima kelompok pertanyaan. Pertama, bagaimana individu atau rumah tangga memperoleh nafkah dan seberapa besar ketergantungannya pada upah? Kedua, siapa memiliki atau menguasai aset produktif, termasuk tanah, mesin, perangkat lunak, data, dan akses ke pasar? Ketiga, siapa menentukan tujuan, metode, ritme, dan evaluasi kerja? Keempat, bagaimana risiko dan hasil ekonomi dibagikan di antara pekerja, pemberi kerja, platform, pemasok, dan negara? Kelima, sejauh mana pekerja dapat menolak, bernegosiasi, berpindah, atau mengorganisasi diri?

Sebagai contoh, pertimbangkan seorang kurir aplikasi di kota besar. Ia memiliki sepeda motor dan telepon, sehingga tidak tepat disebut tanpa aset. Namun, sebagian besar penghasilannya dapat bergantung pada aplikasi yang menentukan permintaan, tarif, dan akses pelanggan. Ia menanggung biaya kendaraan, bahan bakar, perawatan, serta waktu menunggu, sementara perubahan algoritma dapat mengubah pendapatan. Jika pilihan kerja alternatif terbatas dan ia tidak dapat memengaruhi aturan, maka terdapat ciri ketergantungan proletarian yang penting. Akan tetapi, klasifikasi tetap perlu mempertimbangkan apakah ia bekerja penuh waktu, memiliki usaha lain, atau mengelola beberapa sumber nafkah.

Bandingkan dengan pemilik kios yang bekerja sendiri. Ia memiliki stok dan peralatan, menentukan jam buka serta harga dalam batas pasar, dan tidak menjual tenaga kerja kepada satu pemberi kerja. Ia mungkin berpendapatan rendah dan rentan terhadap utang, persaingan, atau kenaikan sewa. Kondisinya dapat lebih tepat dianalisis sebagai usaha mikro atau produsen kecil yang rentan. Jika ia mempekerjakan orang dan mengendalikan kerja mereka, ia juga berada pada posisi pemberi kerja terhadap pekerjanya. Satu individu dapat memiliki posisi berbeda dalam relasi ekonomi yang berlainan.

Contoh berikutnya adalah petani kecil yang menguasai lahan sempit, tetapi pendapatan panen tidak mencukupi. Ia bekerja sebagai buruh tani ketika musim tanam di lahan lain, menjual hasil kepada satu pembeli dominan, dan meminjam modal dengan bunga tinggi. Rumah tangga ini menjalani mata pencaharian campuran dan sebagian proses proletarianisasi. Label "petani" masih benar, tetapi tidak cukup menjelaskan ketergantungan dan kerentanannya. Analisis yang lebih cermat dapat menggunakan kategori semi-proletar atau rumah tangga tani berpendapatan campuran.

Kerangka tersebut bukan tes biner yang menghasilkan satu jawaban untuk semua keadaan. Ia membantu menyusun gambaran multidimensi. Dalam penelitian kuantitatif, beberapa indikator dapat dimasukkan ke dalam variabel atau tipologi; dalam penelitian kualitatif, wawancara dan observasi dapat mengungkap pengalaman kontrol dan ketergantungan yang tidak tertangkap oleh status pekerjaan saja. Transparansi cara klasifikasi lebih penting daripada memaksakan satu kategori yang tampak sederhana.

14. Kesimpulan

Istilah *proletar* berkembang dari kategori kewargaan dan kekayaan dalam masyarakat Romawi menjadi konsep utama dalam analisis kapitalisme modern. Transformasi makna yang dilakukan Marx dan Engels menempatkan hubungan terhadap sarana produksi dan ketergantungan pada penjualan tenaga kerja sebagai inti pengertian. Karena itu, proletar tidak identik dengan orang miskin,

buruh kasar, atau kelompok politik tertentu. Ia adalah konsep relasional yang dapat membantu menjelaskan bagaimana produksi, kepemilikan, kendali kerja, dan distribusi hasil membentuk kehidupan sosial.

Pemakaian istilah ini memerlukan kehati-hatian. Pekerja upahan tidak homogen; petani, pekerja informal, profesional, migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja platform memiliki posisi serta risiko yang berbeda. Perubahan ekonomi Indonesia juga mendorong penyesuaian kosakata kelas, sebagaimana terlihat pada konsep Marhaen yang berusaha mencakup rakyat kecil dengan kepemilikan produktif terbatas. Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa teori sosial perlu berdialog dengan sejarah lokal, bukan sekadar memindahkan kategori dari masyarakat lain.

Dalam era jasa dan digital, proletariat tidak hilang, tetapi bentuk ketergantungannya berubah. Kepemilikan perangkat kerja dapat berjalan bersamaan dengan ketergantungan pada platform; kerja jarak jauh dapat membuka pasar internasional tetapi melemahkan perlindungan; otomatisasi dapat mengurangi tugas tertentu sekaligus meningkatkan pengawasan. Oleh sebab itu, penggunaan istilah *proletar* sebaiknya disertai pertanyaan empiris tentang pendapatan, aset produktif, kontrol, risiko, dan daya tawar.

Bagi pengajaran dan penelitian manajemen, konsep ini membantu melihat bahwa organisasi bukan hanya struktur teknis untuk menghasilkan barang dan jasa. Organisasi juga merupakan arena relasi kerja, kuasa, dan pembagian manfaat. Dengan mendefinisikan istilah secara eksplisit, mengakui variasi pengalaman pekerja, dan menguji klaim dengan bukti, pembaca dapat memanfaatkan konsep proletar secara ilmiah sekaligus relevan bagi pemahaman perubahan sosial masa kini.

Glosarium

- **Buruh:** Orang yang melakukan pekerjaan, lazimnya dengan menerima upah; pemakaiannya dalam bahasa Indonesia sering merujuk pada pekerja manual atau pekerja dalam hubungan industrial.

- **Kelas sosial:** Pengelompokan relasional yang berkaitan dengan sumber daya, kepemilikan, kewenangan, peluang hidup, dan posisi dalam struktur ekonomi.
- **Kelas pekerja:** Istilah luas bagi orang yang terutama memperoleh nafkah melalui pekerjaan berupah; definisi rinci berbeda menurut pendekatan penelitian.
- **Lumpenproletariat:** Istilah historis dalam tradisi Marxian untuk lapisan yang berada di luar atau terhubung secara longgar dengan kerja produksi terorganisasi; penggunaannya kini diperdebatkan dan dapat bernada merendahkan.
- **Marhaen:** Konsep politik Indonesia yang diasosiasikan dengan Sukarno untuk menggambarkan rakyat kecil tertindas, termasuk mereka yang masih memiliki alat produksi sederhana.
- **Nilai lebih:** Dalam teori Marx, nilai yang dihasilkan pekerja melebihi nilai upah yang diterima dan menjadi dasar analisis surplus serta akumulasi kapital.
- **Proletariat/proletar:** Kelas atau anggota kelas yang nafkahnya terutama bergantung pada penjualan tenaga kerja dan yang tidak menguasai sarana produksi secara efektif.
- **Proletarisasi:** Proses meningkatnya ketergantungan pada penjualan tenaga kerja atau hilangnya kontrol atas sumber nafkah produktif.
- **Relasi produksi:** Hubungan sosial yang mengatur kepemilikan, kontrol, koordinasi, dan pembagian hasil dalam proses menghasilkan barang atau jasa.
- **Sarana produksi:** Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti tanah, mesin, gedung, bahan, infrastruktur, perangkat lunak, dan data produktif.
- **Semi-proletar:** Individu atau rumah tangga yang menggabungkan pendapatan upahan dengan produksi mandiri, pertanian kecil, atau usaha keluarga.

- **Tenaga kerja:** Kapasitas fisik, intelektual, dan emosional manusia untuk bekerja; dalam hubungan kapitalis, kapasitas ini dapat dijual sebagai komoditas.
- **Prekariat:** Istilah bagi kelompok yang mengalami ketidakamanan kerja dan hidup; cakupan serta statusnya sebagai kelas tersendiri masih diperdebatkan.

Daftar Pustaka

Engels, F., & Marx, K. (1848/2002). *The Communist Manifesto* (G. S. Jones, Ed.). Penguin Classics. (Karya asli diterbitkan 1848).

Kaya, Y. (2012). Proletariat (working class). *Oxford Bibliographies in Sociology*. https://doi.org/10.1093/obo/9780199756384-0089

Marx, K. (1867/1976). *Capital: A critique of political economy, Volume I* (B. Fowkes, Trans.). Penguin Books. (Karya asli diterbitkan 1867).

Marx, K. (1852/1978). The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. In R. C. Tucker (Ed.), *The Marx-Engels reader* (2nd ed., pp. 594–617). W. W. Norton. (Karya asli diterbitkan 1852).

Muslim, F. A., Rochwulaningsih, Y., & Sudarsih, S. (2026). Marhaenisme sebagai rekontekstualisasi Marxisme dalam pemikiran Sukarno. *Jurnal Sejarah Citra Lekha, 10*(1), 76–89. https://doi.org/10.14710/jscl.v10i1.72404

Przeworski, A. (1977). Proletariat into a class: The process of class formation from Karl Kautsky's *The Class Struggle* to recent controversies. *Politics & Society, 7*(4), 343–401. https://doi.org/10.1177/003232927700700401

Schaupp, S. (2022). Cybernetic proletarianization: Spirals of devaluation and conflict in digitalized production. *Capital & Class, 46*(1), 11–31. https://doi.org/10.1177/03098168211017614

Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Networked but commodified: The (dis)embeddedness of digital labour in the gig economy. *Sociology, 53*(5), 931–950. https://doi.org/10.1177/0038038519828906

Wright, E. O. (1980). Varieties of Marxist conceptions of class structure. *Politics & Society, 9*(3), 323–370. https://doi.org/10.1177/003232928000900303

Wright, E. O. (2000). Class counts: Comparative studies in class analysis. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511488917

Refleksi dan Diskusi

1. Apakah kepemilikan kendaraan atau perangkat kerja cukup untuk menyebut seorang pekerja sebagai mandiri? Jelaskan dengan menilai kendali atas harga, pelanggan, jadwal, dan risiko.
2. Dalam konteks Indonesia, kapan konsep Marhaen lebih tepat daripada proletar? Apa yang diperoleh dan apa yang hilang ketika kategori yang lebih luas digunakan?
3. Bagaimana perusahaan dan pemerintah dapat memastikan bahwa peningkatan produktivitas melalui algoritma atau otomasi dibagikan secara adil kepada pekerja?
4. Pilih satu kelompok pekerja di sekitar Anda. Uraikan sumber pendapatan, aset produktif, kendali kerja, risiko, dan daya tawarnya sebelum menetapkan kategori analitis.

Catatan akhir

Istilah *proletar* paling berguna ketika dipakai untuk mengungkap hubungan ekonomi yang tidak langsung tampak dari status pekerjaan atau tingkat pendapatan saja. Ia menolong pembaca bertanya siapa yang memiliki, siapa yang mengendalikan, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang menerima hasil. Ketika definisi, konteks, dan bukti dinyatakan secara terbuka, istilah ini dapat menjadi alat pembelajaran yang tajam untuk membaca perubahan dunia kerja dan tantangan keadilan sosial.